MAKNA PENTING BUDAYA DAN HUKUM DALAM ANTROPOLOGI HUKUM

Nama : Aidil Lutfhi
Email: aidillutfhi6100@gmail.com
No BP: 211003600147
Universitas Eka Sakti Padang

A. PENDAHULUAN

Hukum dan budaya merupakan dua hal yang sangat penting dan menjadi kenyataan bahwa antara manusia, masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dimana ada masyarakat pasti ada manusia, dan dimana ada manusia yang harus hidup bermasyarakat. Setiap manusia dalam kehidupan masyarakat selalu menghubungkan kepentingan seseorang dengan yang lain. Dalam masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat sederhana (bersahaja), yang disebut keadilan dan kepastian hukum tetap menjadi kebutuhan. Karena kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum ada dalam masyarakat, maka masyarakat itulah yang menciptakan aturan, yang diakui secara kolektif.

Dengan demikian ada acuan untuk menentukan batas-batas hak dan batas kewajiban. Masyarakat bertindak menurut kaedah yang disepakati. Penyimpangan terhadap kesepakatan akan diberi ganjalan sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Demi terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga perlu adanya hukum. Keberadaan hukum ini adalah merupakan suatu keharusan dalam masyarakat. Seperti yang tertulis oleh Van Apeldorn, bahwa hukum ada di seluruh dunia dimana ada pergaulan hidup manusia. Demikian pula Cicero menegaskan dimana ada masyarakat pasti di sana ada hukum. Pernyataan ini dipertegas oleh A.H Post yang menyatakan bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak memiliki hukum (Dherana, 1982:1-2).

Aturan hukum harus dapat memberikan jaminan lahiriah dan batiniah. Kedua jaminan ini harus tetap dalam suasana damai. Perdamaian meliputi aspek ketertiban atau keamanan dan ketentraman, serta ketenangan. Ketertiban menunjukkan konteks komunikasi lahiriah, sedangkan ketenangan mengacu pada konteks komunikasi batiniah.

Dengan demikian, antara manusia, masyarakat, dan budaya menunjukkan hubungan koneksitas, dimana dari hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat (manusia) yang melahirkan kebudayaan dan dalam masyarakatlah budaya hidup, tumbuh, dan berkembang yang dibutuhkan oleh masyarakat (manusia) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.

B. PEMBAHASAN

Budaya dan hukum merupakan salah satu bagian dari budaya manusia yang begitu luas. Budaya dan hukum ini merupakan respon umum yang sama dari orang-orang tertentu terhadap fenomena hukum. Respon tersebut merupakan kesatuan pandangan nilai dan perilaku hukum. Jadi hal ini menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan respon (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dijalani oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan mengetahuinya pada masyarakat setempat akan menjadi bahan informasi yang penting, artinya untuk mengetahui susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukanlah budaya pribadi tetapi budaya keseluruhan masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari keadaan masyarakat, sistem dan struktur masyarakat yang mengandung budaya hukum.

A. Pengertian Hukum dan Budaya

Hukum adalah aturan hidup yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sebagai aturan hidup maka hukum berfungsi untuk membatasi kepentingan masing-masing pendukung hukum (subyek hukum), menjamin kepentingan dan hak masing-masing, dan membuat ikatan untuk memperkuat hubungan antara orang-orang dan menentukan arah kerjasama. Tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan hukum adalah suatu keadaan yang meliputi perdamaian, keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan bersama.

Hukum dapat mencapai tujuannya jika terdapat keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau kesesuaian antara kepastian umum atau objektif dan penerapan keadilan khususnya yang bersifat subjektif. Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepastian hukum dan keadilan memerlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Kaidah hukum dan penerapannya semaksimal mungkin untuk mendekati citra publik;
2. Aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas sosial sesuai dengan tujuan dan keinginan hukum;
3. Masyarakat dimana hukum itu berlaku, taat dan sadar tentang pentingnya hukum untuk keadilan dan kesejahteraan dan untuk memenuhi keinginan hukum akan keadilan.

Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian cara hidup itu, yaitu bagian. Selo Sumardjan dan Soleman Soemardi merumuskan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (kebudayaan material) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur

masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat yang kemudian menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta dapat juga disebut sebagai kebudayaan rohaniah (spiritual atau immaterial culture).

B. Pentingnya Budaya dan Hukum

Sistem hukum adalah hubungan yang saling berhubungan antara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan, maka titik perhatian antropologi hukum terhadap perilaku orang-orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kaitan antara perilaku hukum, manusia dengan budaya hukumnya berada dalam tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan praktis dengan sudut pandang eklektika. Secara konseptual, budaya hukum mengacu pada sikap dan tindakan nyata terlihat, merupakan cerminan dari nilai-nilai serta orientasi dan harapan yang ada dalam orang atau kelompok. Maka sikap dan tindakan yang diambil oleh siapapun, terutama yang berhubungan dengan hukum, dirumuskan dan diterima sebagai budaya hukum.

Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian dari kehidupan hukum. Meminjam konsep Lawrence Friedman, norma hukum adalah aspek yang substansial hukum, disamping itu ada struktur dan budaya hukum. Struktur mengacu pada pembentukan dan lembaga pelaksana hukum dan budaya hukum mengacu pada nilai, orientasi dan harapan atau impian masyarakat tentang hukum. Aparatur dan budaya hukum harus dibuat fokus pada pengembangan hukum. Itu berarti bahwa pembentukan, pemerintahan, nilai-nilai, orientasi dan impian komunitas tentang hukum harus menjadi prioritas utama.

Walaupun norma hukum terkandung dalam setiap undang-undang dan selalu dianggap sebagai nilai panduan dan orientasi setiap orang, bagaimanapun secara empiris selalu ada kekurangan mencela. Tingkah laku orang tidak selalu sesuai dengan norma yang ada dalam

hukum. Penyebabnya sangat berbagai salah satunya adalah norma tidak sejalan dengan orientasi dan impian mereka.

Bahkan, konsepsi hukum yang bersifat nasional mudah diterima oleh masyarakat, khususnya yang menyangkut kebutuhan sosial ekonomi, tetapi tentang sosial budaya dan agama khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perilaku keagamaan adalah isu sensitif di masyarakat. Penegakan hukum mendukung ketertiban sosial, juga menjadi ukuran nilai bagi mengukur tingkat budaya dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa.

Dalam konteks ini dapat dilihat hukum bertindak sebagai alat penegakan supremasi hukum, sebagai alat penegakan keadilan, sebagai pendukung cita-cita demokrasi, mendukung gagasan kesetaraan kesejahteraan, pencegahan kesewenang-wenangan. Menurut Joseph Kohler, hukum tidak dapat diabaikan, hukum memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan budaya. Hukum mempertahankan nilai budaya yang harus dilindungi dan ditumbuhkan yang baru. Hukum yang tidak memainkan peran, tidak hanya menghambat pertumbuhan budaya tetapi akan menghancurkan budaya yang pada akhirnya akan menghilangkan sebuah peradaban.

C. PENUTUP

Tujuan pembahasan mengenai makna penting budaya dan hukum ini semata-mata untuk dapat mengenali atribut-atribut dasar untuk mengkaji proses-proses yang sedang berlangsung dan berubah atau yang sinkron dengan perkembangan masyarakat, karena sifat kontra-sosial tidak selalu tetap. Perubahan budaya hukum tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat modern, tetapi juga di kalangan masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan meskipun perubahannya tidak cepat atau lambat tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.

Uraian di atas dapat menjadi kunci, bahwa budaya dan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam rangka reformasi hukum, karena dua hal ini mempengaruhi semua sistem hukum. Budaya hukum merupakan jaringan nilai dan perilaku yang berhubungan dengan hukum. Budaya dan hukum ini menentukan kapan, mengapa dan di mana warga negara beralih ke hukum, aturan atau meninggalkan sama sekali sehingga dapat merepresentasikan dunia sosial penerima keadilan, perilakunya menentukan berjalannya sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa PascaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..